

INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Muhammad Fajar, Zul Azhar

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Email: muhammadfajar.mf757@gmail.com

Abstrak: *This research aims to know and analyze determine of corruption and the human development index to economic growth in Southeast Asian countries. This research use panel least square and Fixed Effect Model. The estimation result should that corruption has a possitive and significant effect on economic growth in Southeast Asian countries and the human development Index has a possitive and significant effect on economic growth in Southeast Asian countries. From the result of this research, to increase economic growth, the government in SoutheastAsian countries must strengthen the bureaucratic and legal institutions of a country, increase the role of the government or related agencies in monitoring and crackingdown on corruption that results in lossof government productivity and allocating resources appropriately so that the creation of peace and prosperity among the countries in Southeast Asian.*

Keywords: *Economic Growth, Corruption, Human Development Index*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara. Keberhasilan kinerja pemerintah beserta lembaga dan instansi-instansi terkait cenderung diukur dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai pembangunan ekonominya.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari faktor-faktor, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan, lemahnya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Namun permasalahan timbul ketika sarana dan prasarana publik yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi memiliki kualitas yang buruk dan terbatas yang disebabkan oleh para pemangku kekuasaan yang melakukan penyelewengan terhadap anggaran, dimana hal tersebut memberikan dampak terhadap kekacauan di sektor publik dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini difokuskan pada lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura. Kelima negara ini merupakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian suatu negara, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau *Product Domestic Bruto* (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting atau sesuatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Machmud, 2016, 34).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2010-2015 yang mengalami fluktuasi. Terlihat dari kelima negara yang menjadi fokus penelitian, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada negara Thailand pada tahun 2012 sebesar 7,24 persen. Hal ini diduga terjadi karena rendahnya tingkat pengangguran yang disebabkan tingginya serapan tenaga kerja pada sektor pertanian di negara tersebut sehingga mengantarkan Thailand sebagai negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi terendah juga terjadi di Negara Thailand yakni mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,84 persen pada tahun 2011. Hal ini diduga terjadi akibat dari banjir parah yang terjadi pada kuartal terakhir tahun 2011 lalu menyebabkan perekonomian Thailand menyusut. Bahkan penurunan pertumbuhan ekonominya mencatat yang terburuk sejak krisis finansial tahun 1997 silam.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, beberapa di antaranya investasi, teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan. Tetapi dalam beberapa kasus sebagian besar peneliti belum melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh korupsi (Charisma dan Aloysius, 2015). Hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi menurut Huntington (1968) bahwa korupsi akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mempercepat birokrasi sehingga permasalahan di birokrasi lebih mudah diselesaikan menggunakan uang daripada dengan mengikuti birokrasi yang ada. Sedangkan menurut Blackburn, dkk (2005:1-7) menyatakan

korupsi mengganggu aktifitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktifitas dan kreatifitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreatifitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dan dapat mengakibatkan *high cost economy* dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi, keberadaan korupsi akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga mengakibatkan timbulnya kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan, korupsi juga dapat mempengaruhi inovasi dan produktifitas masyarakat karena menurunnya peran pemerintah yang produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berbagai sumber penelitian mengatakan bahwa korupsi memiliki dampak yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, yaitu: Mengurangi anggaran negara yang akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi dan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama dibidang jaminan social dan pembayaran kesejahteraan publik, mengganggu pertahanan negara dan kestabilan politik, akibat para pengatur kebijakan yang tidak melaksanakan tujuan nasional dengan baik, korupsi menurunkan pendapatan pajak perusahaan dan kegiatan yang didorong ke sektor informal dengan mengambil sewa berlebihan dan pajak dikurangi dengan imbalan hadiah kepada pejabat pajak, korupsi mengalihkan bakat menjadi *rent seeking*: pejabat yang seharusnya dapat terlibat dalam kegiatan produktif menjadi beralih kepada pengambilan biaya sewa dan terjadinya *talent miss allocated*, yaitu menempatkan orang bukan pada tempatnya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara. Perolehan data IPK menggunakan skala dari 0-100. Jika skor IPK suatu Negara mendekati "0" maka tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut sangat tinggi dan sebaliknya, jika skor IPK suatu Negara mendekati "100" maka Negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang rendah atau dengan kata lain bersih dari korupsi. Terlepas dari berbagai kelemahan sistem pengukuran yang ada, peringkat dan skor IPK yang dipublikasikan berhasil memicu negara-negara dengan peringkat IPK terendah untuk serius dalam menangani dan memerangi korupsi di negaranya.

Perkembangan korupsi di lima negara yang menjadi fokus penelitian mengalami fluktuasi. Sepanjang tahun 2010-2015, negara yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi tertinggi berada pada Negara Singapura tahun 2010 sebesar 93 dan pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Negara Singapura sebesar US\$ 236.421.782.178. Pertumbuhan ekonomi Negara Singapura menjadi nomor 2 tertinggi setelah Negara Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh suatu negara, maka akan semakin baik kondisi perekonomian negara tersebut. Sedangkan negara yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah berada pada Negara Filipina pada tahun 2010 yakni sebesar 24 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar US\$ 199.590.775.189. Pertumbuhan ekonomi Negara Filipina pada tahun 2010 merupakan yang paling terendah diantara lima negara lain yang menjadi fokus penelitian. Hal ini juga membuktikan bahwa semakin rendahnya perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh suatu negara akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Korupsi juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ada di suatu Negara. Jika skor IPK naik mendekati 100 maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat dan bergerak kearah yang cenderung akan menguntungkan negara-negara di Asia Tenggara, begitu juga sebaliknya, jika skor IPK turun mendekati 0 maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan turun dan bergerak kearah yang cenderung akan menguntungkan negara-negara di Asia Tenggara. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dapat mengurangi anggaran negara yang akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi dan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama dibidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik.

Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai saran penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi dan I Ketut, 2014).

Manusia adalah kekayaan bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri bukan merupakan alat dari pembangunan (UNDP: *Human Development Report* 2000: 16).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Semakin tinggi keberhasilan manusia maka semakin bagus sumber daya manusia di Negara tersebut. Suatu negara yang dikatakan maju dapat tercermin jika yang dijadikan acuan salah satunya adalah masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tentu saja menjelaskan seberapa besar perkembangan manusia disuatu negara. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang bisa dieksplorasi dan digali sehingga menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dipengaruhi oleh indikator kesehatan yang diwakili oleh Usia Harapan Hidup (UHH), indikator pendidikan yang diwakili oleh Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan indikator ekonomi yang diwakili oleh Daya Beli Masyarakat (PPP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas hidup penduduk. Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta memperoleh pendapatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan. Kesehatan masyarakat yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah, produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dikarenakan keterbatasan biaya, hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Salah satu keuntungan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun Human Development Indeks (HDI), mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah, dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah. (Sasana Hadi, 2009)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang ada pada lima negara yang menjadi fokus penelitian mengalami fluktuasi. Dari kelima negara objek penelitian negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Negara Singapura pada tahun 2015 sebesar 92,5 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar US\$ 304.097.759.674.

Tingginya Indeks Pembangunan Manusia ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas manusia di negara tersebut. Terbukti dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia Negara Singapura sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sedangkan negara yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah berada pada Negara Indonesia pada tahun 2010 sebesar 66,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar US\$ 755.094.160.363. Semakin rendah indeks pembangunan manusia di suatu negara mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di negara tersebut rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara”**.

TINJAUAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pengaruh dari nilai pendapatan nasional yang dinyatakan dalam satuan harga/besaran nominal. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan adanya peningkatan produksi barang atau jasa secara fisik dalam periode tertentu. Meningkatnya pendapatan nasional suatu negara, mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian suatu negara, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau *Product Domestic Bruto* (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada penelitian ini teori pertumbuhan ekonomi yang penulis gunakan adalah teori endogen, karena penelitian ini melihat pengaruh ketersediaan dan kondisi infrastruktur,

hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Korupsi

Alatas (Semma, 2008:32) menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. *World Bank* (dalam Subekti, 2013) mengatakan korupsi adalah setiap transaksi antara para pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah dorongan yang terdapat didalam diri seorang untuk memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan metode pencurian dan penipuan dalam menyalahgunakan kekuasaan/kedudukan publik dan swasta untuk kepentingan pribadi.

Teori yang digunakan dan dipilih sebagai asumsi terjadinya tindakan korupsi adalah teori *Klitgaard* dan *Jack Bologne*, karena memakai persamaan yang sesuai dengan definisi penelitian yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi disektor publik. Dalam penelitian ini kategori korupsi yang akan dibahas lebih mengarah kepada *grand corruption*, yaitu sejumlah besar sumber daya publik yang dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik yang dilakukan oleh para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara ataupun antardaerah (Todaro, 2009:57). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pemabangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM terbagi dalam tiga golongan, golongan pertama IPM < 50 (Rendah), golongan kedua 50 < IPM < 80 (Menengah/Sedang) dan golongan ketiga IPM > 80 (Tinggi) (Erwin, dkk, 2011).

Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dikarenakan keterbatasan biaya, hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Salah satu keuntungan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun Human Development Indeks (HDI), mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah, dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah. (Sasana Hadi, 2009).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibahas seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan analisis regresi panel dan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Variabel pertumbuhan ekonomi menjadi variabel terikat dan korupsi serta Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel bebas. Dengan menggunakan unit analisis 5 negara di Asia Tenggara dan data yang digunakan dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$\text{Log}(Y_{it}) = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + U_{it} \quad (1)$$

dimana $\text{Log}(Y_{it})$ adalah pertumbuhan ekonomi, X_{1it} adalah korupsi dan X_{2it} adalah Indeks Pembangunan Manusia.

HASIL dan PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh korupsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat bahwa korupsi memiliki rata-rata sebesar 49 persen pada tahun 2014 yang merupakan nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan nilai rata-rata korupsi terendah berada pada tahun 2000 sebesar 43 persen.

Selanjutnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai rata-rata tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 78 persen dan nilai rata-rata terendah berada pada tahun 2000 sebesar 68 persen.

Dari hasil pengujian persamaan dengan menggunakan aplikasi *Eviews 8* dapat terlihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dari hubungan antar variabel tersebut diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$\widehat{\text{Log } Y_{it}} = 20,159 + 0,006 X_1 + 0,080 X_2 \quad (2)$$

Tabel 1 berdasarkan hasil penelitian persamaan menunjukkan korupsi (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) negara-negara di Asia Tenggara melalui data 5 negara Asia Tenggara yang menjadi fokus penelitian dengan koefisien regresi sebesar 0,006. Hal ini berarti apabila korupsi meningkat sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,006 persen. Artinya, semakin meningkat korupsi maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (X_2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) negara-negara di Asia Tenggara melalui data 5 negara Asia Tenggara yang menjadi fokus penelitian dengan

koefisien regresi sebesar 0,080. Hal ini berarti apabila IPM meningkat sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,080 persen. Artinya, semakin meningkat Indeks Pembangunan Manusia maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(GDP)
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2000 2017
 Periods included: 18
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.15942	0.144207	139.7955	0.0000
IPK	0.006923	0.001416	4.890037	0.0000
IPM	0.080650	0.002007	40.17516	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990174	Mean dependent var	26.39410
Adjusted R-squared	0.989464	S.D. dependent var	0.540820
S.E. of regression	0.055513	Akaike info criterion	-2.869827
Sum squared resid	0.255777	Schwarz criterion	-2.675398
Log likelihood	136.1422	Hannan-Quinn criter.	-2.791422
F-statistic	1394.031	Durbin-Watson stat	0.549731
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8, 2018

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji heterokedastisitas. Berdasarkan dari hasil semua uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengidentifikasi gangguan heterokedastisitas pada model yang dibangun dapat dilakukan menggunakan nilai *Resabs*. Apabila nilai probabilitas variabel bebas $\geq 0,05$, maka model terbebas dari masalah heterokedastisitas, begitupun sebaliknya. Apabila nilai probabilitas variabel bebas $\leq 0,05$, maka model terkena masalah heterokedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/25/18 Time: 21:11
 Sample: 2000 2017
 Periods included: 18
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.119172	0.064147	1.857785	0.0666
IPK	0.000407	0.000420	0.968409	0.3355
IPM	-0.001319	0.001113	-1.185208	0.2392

Sumber: Eviews 8 (data diolah, 2018)

Terlihat bahwa probabilitas variabel bebas ≥ 0.05 . Hal ini berarti menunjukkan bahwa data telah terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dengan level signifikan $\alpha = 0,005$. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika t hitung < t tabel atau $-t$ hitung > $-t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh variabel secara individual begitupun sebaliknya. Untuk menghitung nilai t tabel dicari pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $90-2 = 88$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,662.

Dari hasil estimasi pada Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 4,890037 > t_{tabel} = 1,662$ pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima sehingga hipotesis alternative yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Dari hasil estimasi pada Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 40,17516 > t_{tabel} = 1,662$ pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dengan asumsi *ceteris paribus*.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dan nilai F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis nol harus ditolak dan hipotesis alternatif harus diterima sehingga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya dengan *level of significant* $\alpha = 0,05$.

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan uji F. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima harus diterima. Nilai F_{hitung} dapat dilihat pada Tabel 4.11, sedangkan untuk nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel F dengan nilai $df_1 = k-1$ ($2-1 = 1$) dan $df_2 = n-k$ ($90-2 = 88$) pada $\alpha = 0,05$ maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,95. Berdasarkan Tabel 4.11 Dapat dilihat dalam jangka panjang nilai $F_{hitung} = 1394,031 >$ dari nilai $F_{tabel} = 3,95$. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel bebas secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang dapat diberikan oleh variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat yang diukur dengan persentase. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai R^2 sebesar 0,990. Hal ini berarti sebesar 99% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu korupsi dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau tidak dimasukkan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara-negara di Asia Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang dilihat dari tinggi atau rendahnya Indeks Persepsi Korupsi. Jika nilai skor IPK meningkat atau mendekati 100 maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, begitu pula sebaliknya, ketika skor IPK menurun atau mendekati 0 maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dengan asumsi *ceteris paribus*. Artinya di sektor ekonomi, korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari rendahnya skor IPK dapat terjadi melalui terganggunya mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga mengakibatkan timbulnya kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan, korupsi juga menjadi sebab menurunnya kualitas pelayanan birokrasi pemerintah dan infrastruktur dalam meningkatkan tekanan pada anggaran pemerintah dan mempengaruhi inovasi serta kreatifitas masyarakat karena kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Klitzgard (dalam Subekti, 2013), yang menyatakan bahwa korupsi hanya bias terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh dikresi atau keleluasaan dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam hal pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas).

Namun, tidak sesuai dengan teori kebutuhan Maslow (dalam Subekti, 2013) yang menyatakan bahwa setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar dihargai, berperilaku terpuji, dan demokratis. Sebab, penelitian ini terfokus kepada permasalahan korupsi terhadap sektor publik di suatu negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mo dan Sri Nawatmi yang menyatakan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huntington (1968) dan Dewi (2002) yang menyatakan bahwa tidak semua korupsi berdampak buruk terhadap perekonomian. Korupsi yang bersifat "*speed Money*" berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rata-rata kasus korupsi yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2000-2017 yang mengalami kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi diantaranya adalah Singapura dengan skor IPK sebesar 90,17, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai skor Indeks Persepsi Korupsi Singapura mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa pemerintah Singapura semakin lengah dalam mengatasi kasus korupsi yang terjadi di negaranya. Sedangkan Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi paling rendah jika dibandingkan dengan empat negara lainnya di Asia Tenggara yaitu sebesar 28,44. Hal ini menandakan bahwasanya pemerintah Indonesia kurang tanggap dan sigap dalam mencegah berbagai tindakan korupsi di negaranya.

Rata rata skor Indeks Persepsi Korupsi negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2000-2017 adalah sebesar 46,26%. Ini menandakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi di kelima negara Asia Tenggara mengalami perkembangan dikisaran angka 46,26% setiap tahunnya. Standar Deviasi Indeks Persepsi Korupsi di negara-negara Asia Tenggara adalah 1,89% yang menandakan bahwa tingkat penyimpangan masing-masing data dari nilai rata-rata adalah sebesar 1,89%. Koefisien Variasi pada negara-negara Asia Tenggara adalah sebesar 4,085%, yang artinya tingkat keragaman dari Indeks Persepsi Korupsi di lima negara Asia Tenggara selama 18 tahun tergolong rendah.

Simpulannya, kelambanan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara dalam mencegah serta menangani tindakan korupsi di negara mereka menyebabkan terguncangnya stabilitas politik serta keamanan dalam negeri. Selain itu jika hal ini terus dibiarkan maka akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tentu akan mengganggu stabilitas nasional dalam negeri sehingga akan berdampak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah di negara-negara Asia Tenggara guna mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dalam berbagai bentuk untuk menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara-negara di Asia Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang dilihat dari tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Jika nilai IPM meningkat atau mendekati 100% maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, begitu pula sebaliknya, ketika nilai IPM menurun atau mendekati 0 maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dengan asumsi *ceteris paribus*.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura merupakan negara di Asia Tenggara dengan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup baik secara kuantitatif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya: (a) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran; (b) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran; dan (c) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

Pembangunan diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Manusia atau masyarakat adalah kekayaan dan modal dasar dalam pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan pada indikator ekonomi maupun sosial kearah yang lebih baik. Tujuan utama pembangunan yaitu untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati (2012) serta Muhammad Febi Utama (2013) yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat akan menggerakkan perekonomian daerah terutama di sektor industri.

Rata rata Indeks Pembangunan Manusia negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2000-2017 adalah sebesar 73,36%. Ini menandakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi di kelima negara Asia Tenggara mengalami perkembangan dikisaran angka 73,36% setiap tahunnya. Standar Deviasi Indeks Persepsi Korupsi di negara-negara Asia Tenggara adalah 3,03% yang menandakan bahwa tingkat penyimpangan masing-masing data dari nilai rata-rata adalah sebesar 3,03%. Koefisien Variasi pada negara-negara Asia Tenggara adalah sebesar 4,137%, yang artinya tingkat keragaman dari Indeks Pembangunan Manusia di lima negara Asia Tenggara selama 18 tahun tergolong rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh korupsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara selama 18 tahun periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial korupsi dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya hasil penelitian juga menjelaskan bahwa secara bersama-sama variabel korupsi dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah di negara-negara Asia Tenggara harus memperkuat lembaga birokrasi dan hukum suatu negara, meningkatkan peran pemerintah atau pun instansi terkait dalam mengawasi dan menindak kejahatan korupsi yang mengakibatkan hilangnya produktifitas pemerintah, serta mengalokasikan sumber daya dengan tepat agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan penduduk antar negara-negara di Asia Tenggara. Untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi, pemerintah di negara-negara Asia Tenggara harus memperketat pengawasan pada birokrasi pemerintah, proyek pembangunan infrastruktur, dan pengadaan sarana prasarana publik agar dapat mempersempit ruang gerak bagi pejabat publik untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang peran sentral harus berupaya untuk memaksimalkan baik itu anggaran maupun tenaga ahli di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena Indeks Pembangunan Manusia merupakan standar atau ukuran untuk melihat kompetensi sumber daya manusia atau *welfare* (kesejahteraan) masyarakat di suatu daerah atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn K; Bose N; and Haque M.E. 2005. “*Public Expenditures, Bureaucratic Corruption and Economic Development*”, Economic Discussion Paper EDP-0530, The University of Manchester.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, A. Agung I G dan Supadmi, I. Niluh. 2016. Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 14.1. Januari (2016). Hal : 695-722.
- Dornbusch, Rudiger, dan Stanley Fischer. 2008. *Makroekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Grubel, Harbert. 1998. “*Economic Freedom and human welfare: some Empirical Findings*” *Journal of simonfraser University*. Vol2: hal 287-304.
- Gujarati; Damodar; dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press.
- Machmud Amir. 2016. “*Perekonomian Indonesia*” Erlangga. Jakarta
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2000, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga.
- Ndakularak Erwin, dkk. 2013. “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Sasana Hadi. 2009. “*Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar Daerah dan Tenaga Kerja terserap terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal*”. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2009, Hal 50-69
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Setiyono, Budi. 2013. *Korupsi, Transisi ekonomi dan Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jurnal.
- Sri Nawatmi. 2013. *Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi - Studi Empiris 33 Provinsi di Indonesia*. Universitas Stikubank.
- Sri Nawatmi. 2016. *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-negara Asia Pasifik*. Universitas Stikubank: Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang.
- Subekti A. H. 2013. *Dampak Korupsi dan Variabel Ekonomi Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sepuluh Negara ASEAN Tahun 2000-2010*. Bogor: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Todaro. Michael. P. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Transparency International (TI). 2016. *Corruption Perception Index*, <http://www.transparency.org/>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.

- United Nations Development Program. 2000. *Human Development Report*, <http://www.undp.org/>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Winarno, 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* Edisi 4. UPP STIM YKPN.
- World Bank. 2017. *International Development, Poverty, and Sustainability*, <http://www.worldbank.org/>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Yosafat Charisma; Aloysius Gunadi Brata. 2016. *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sembilan Negara Asia*. Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.